

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti serta referensi untuk memperoleh bahan perbandingan. Dengan adanya penelitian terdahulu ini diharapkan penelitian terhindar dari anggapan adanya kesamaan dengan penelitian sebelumnya yang memiliki topik serupa :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul, Peneliti, Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan & Persamaan
1	Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA) Terhadap Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Karo Peneliti: Torang P. Simanjutak (2019)	Pendekatan Kuantitatif (bebas) Variabel Independen Pengaruh Penerapan SIMDA Variabel Dependen Kualitas Laporan Keuangan	Hasil penelitian ini penerapan SIMDA berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten karo.	Perbedaan 1.Variabel Yang digunakan berbeda 2.Objek yang digunakan Persamaan Variabel (X1) sama (Y) juga sama
2	Pengaruh Implementasi Sistem Informasi SIMDA Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Pemerintah Desa Bandung Barat) Peneliti : Ruslina Lisda, Liza Laila Nurwulan, Lisna Septianisa(2018)	Pendekatan Kuantitatif Variabel Independen 1.Sistem Manajemen Daerah (SIMDA) Desa 2.Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 3.Kompetensi Sumber Daya Manusia Varibel Dependen Kualitas Laporan Keuangan	1.Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa berpengaruh terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. 2. Sistem PengendalianIntern Pemerintah (SPIP) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan	Perbedaan 1.Variabel yang digunakan 2. Objek Persamaan Sama-sama meneliti mengenai simda

No	Judul, Peneliti, Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan & Persamaan
			3. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bandung Barat.	
3	Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Pemerintah Kabupaten Nias Peneliti: Patricia Diana (2019)	Pendekatan Kuantitatif Variabel Independen Pengaruh Penerapan SIMDA Variabel Dependen Kualitas Laporan Keuangan	Variabel sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.	Perbedaan 1. Variabel Yang digunakan berbeda 2. Objek yang digunakan Persamaan Variabel (X1) sama (Y) juga sama
5	The Influence Of Human Resources Competency And The Use Of Information Technology On The Quality Of Local Government Financial Report With Regional Accounting System As An Inverting Peneliti: Iskandar Muda Dkk (2017)	Variabel Independen Kompetensi SDM, Penggunaan Teknologi Informasi Variabel Dependen Kualitas Laporan Keuangan	1. Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 2. Penggunaan Teknologi informasi (X2) Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Perbedaan : Variabel Yang digunakan dipenelitian Ini berbeda dengan Penelitian Yang Akan Saya Lakukan Persamaan: Variabel Dependen (Y) Sama dengan apa yang saya akan Teliti
6	Penerapan Standar Akuntansi Dan Kualitas Aparatur Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun).	Variabel Independen Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kualitas Aparatur Pemerintahan. Variabel Dependen Laporan Keuangan	1. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), (X2) tidak berpengaruh Signifikan Terhadap Laporan Keuangan 2. Kualitas Aparatur Pemerintahan (X2) Signifikan Terhadap Laporan Keuangan	Perbedaan: Variabel yang digunakan dipenelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan saya lakukan Persamaan: Variabel Dependen

No	Judul, Peneliti, Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan & Persamaan
	Peneliti: Tegor, Juliza, Yusmanila, Fauzan Haqiqi, (2020)			(Y) Sama dengan apa yang akan saya teliti.

Sumber: Berbagai Jurnal

2.2 Kajian Pustaka

2.2.1 Teori Stewardship (Stewardship Theory)

Teori stewardship lebih menggambarkan situasi dimana manajemen tidak termotivasi oleh tujuan – tujuan individu tetapi lebih ditunjukkan sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan dalam sebuah organisasi dan mengasumsikan adanya hubungan yang kuat atas kepuasan dan kesuksesan sebuah organisasi (Yoyo, dan Sudaryo 2017).

Pada *Stewardship Theory*, model of man ini didasarkan pada pelayanan yang memiliki perilaku dimana dia dapat dapat dibentuk agar selalu bisa diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi dari pada individunya dan selalu bersedia untuk melayani. Pada teori Steawardship terdapat suatu pilihan antara perilaku *self serving* dan proorganisational, perilaku pelayanan tidak akan di pisahkan dari kepentingan organisasi, adalah bahwa perilaku eksekutif disejajarkan dengan kepentingan principal dimana Steaward berada. Steaward akan menggantikan atau mengalihkan *self serving* untuk berperilaku kooperatif, sehingga kepentingan antara Steaward dan principal tidak sama, Steaward akan menjunjung tinggi nilai kebersamaan,

sebab Steaward berpedoman bahwa terdapat utilitas yang lebih besar pada perilaku kooperatif dan perilaku tersebut dianggap perilaku rasional yang diterima (Jefri,2018).

Teori *Steawardship* dapat diterapkan pada akuntansi organisasi sektor publik, seperti organisasi pemerintah dan non-profit lainnya. Sejak awal tahun perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *Steaward* dengan *principals* karena Teori *Steawardship* sering disebut sebagai teori pengolahan atau Penata layanan.

Teori *Steawardship* telah muncul dibidang tata kelola perusahaan sebagai alternative teori keagenan, sehingga dapat dipahami bahwa asumsi dasar didefinisikan sebagai berlawanan dengan asumsi teori agensi. Dalam hubungan keagenan penekanannya adalah pada membangun mekanisme kelembagaan dan kontrak sehingga manajer tidak bisa mencapai tujuan mereka sendiri dengan mengorbankan tujuan pemilik, sementara dalam hubungan penatagunaan, jika berhasil dicapai tidak ada masalah seperti itu (Achmad,2012).

2.2.2 Sistem Informasi Manajemen (SIMDA)

Kemampuan mengelola informasi secara efektif dalam sebuah organisasi sangat penting karena dapat menjadi dasar untuk memperoleh keunggulan komperatif. Begitu juga dalam pemerintahan informasi teah

menjadi aktiva tidak berwujud yang jika dikelola dengan baik dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, oleh karena itu pemerintah sudah mulai mengembangkan dan memberi perhatian khusus pada teknologi informasi sebagai sumber yang memfasilitasi pengumpulan dan penggunaan informasi secara efektif. Salah satu bantuan perhatian ini adalah penggunaan aplikasi sistem informasi keuangan berbasis komputer yang dikembangkan oleh BPKP yaitu aplikasi SIMDA yang bertujuan untuk membantu dalam penyusunan LKPD (Firmansyah,2020).

Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan suatu sistem yang dapat membantu manajemen didalam pengumpulan data, pengelolaan serta analisis evaluasi data dan menyajikan ke dalam batas informasi yang bernilai dan akhirnya sampai pada pengambilan keputusan dimana informasi ini berguna untuk mendukung fungsi operasi manajemen (Machmud,2013).

Aplikasi SIMDA adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dimana tujuan dari pengembangan aplikasi ini adalah untuk mempercepat proses reformasi pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dilatar belakangi oleh langkanya sumber daya manusia di pemerintah daerah yang memiliki latar belakang akuntansi sehingga pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aplikasi SIMDA merupakan aplikasi database

yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (Wibowo,2019).

Aplikasi SIMDA dikembangkan dengan memperlihatkan dan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Oleh sebab itu pengendalian terhadap aplikasi menjadi suatu keharusan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan aplikasi SIMDA untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah (LKPD) (Josvidar,2017).

Aplikasi SIMDA telah terintegrasi mulai dari fungsi penganggaran, fungsi penata usahaan keuangan daerah. Sampai fungsi akuntansi dan pelaporan. maka setiap implementasi suatu sistem berbasis computer perlu ditunjukkan pihak yang berperan sebagai administrator. Administrator mempunyai fungsi untuk mengelola database, mengelola aplikasi (*Software*) dan *hardware*, pada masing – masing OPD yang menjadi administrator adalah Pengguna anggaran, Pejabat Penatusahaan Keuangan (PPK), Bendahara pengeluaran, dan Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai pengguna akhir (*end users*) dari aplikasi SIMDA. Akselerasi reformasi pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan efektif apabila fungsi–fungsi pengelolaan keuangan berjalansecara terintegrasi (Wibowo, *Et all* 2017).

2.2.3 Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam menyelesaikan kinerjanya. Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dalam hal ini pekerjaan yang dihasilkan tidak akan tepat waktu dan terdapat pemborosan waktu serta tenaga. Dengan adanya kualitas sumber daya manusia maka waktu pembuatan laporan keuangan akan dapat dihemat. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan, disajikan tepat pada waktunya dan dapat dikatakan berkualitas (Shintia dan Erawati,2017)

Sumber daya manusia merupakan hal terpenting dalam sebuah instansi dan berguna dalam meningkatkan sebuah organisasi, didalam peningkatan kualitas tersebut harus ada sebuah pembinaan sumber daya manusia yang bertujuan agar tenaga kerja bisa disiplin

Sumber daya manusia merupakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai (Riyanto,2012).

Pegawai yang memiliki pemahaman yang rendah terhadap tugas dan fungsinya, serta hambatan yang ditemukan dalam pengolahan data juga akan berdampak pada penyajian laporan keuangan (Indriasari dan Nahartyo,2012).

Kondisi sumber daya manusia yang di miliki pemerintah saat ini kendatipun memiliki keahlian dan di tunjang dengan tekhnologi yang cukup memadai ternyata terkadang tidak memberi perubahan besar dalam peningkatan kinerja. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah dalam bertugas sering tidak memiliki etos kerja yang berorientasi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Apabila sumber daya manusia melaksanakan sistem akuntansi tidak memiliki salah satu kualitas yang di isyaratkan, maka memungkinkan timbulnya hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi, kualitasnya menjadi buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai diantaranya adalah keandalan informasi.

Salah satu tujuan organisasi pemerintah adalah menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sebagai salah satu sumber informasi yang sering digunakan oleh para pengguna laporan keuangan untuk memperoleh laporan keuangan yang berguna dan laporan tersebut harus digunakan oleh orang – orang yang kompeten dibidang manajemen keuangan dan sistem akuntansi (Santoso ,2012).

Sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan karena satker dituntut untuk harus memiliki sumber daya manusia yang berkompeten yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, mengikuti berbagai pelatihan dan memiliki keahlian dibidang keuangan sehingga diharapkan mampu menyusun laporan keuangan secara akurat dan valid (Surastiani dan Handayani,2015).

Terkait dengan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas sangat diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten. Sumber daya manusia merupakan factor terpenting dalam suksesnya kinerja pelaksanaan pemerintahan, untuk itu sangat perlu upaya terus menerus untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia seiring dengan perubahan yang terjadi.

2.2.4 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Akuntansi pemerintah adalah konsep dasar dalam penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah dan merupakan acuan bagi komite standar kuntansi pemrintah, penyusunan laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum di atur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintah,

Akuntansi perintah merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. Tuntunan transparansi dan akuntabilitas publik atas

dana–dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan. Lingkup pemerintahan yang dimaksud yaitu pemerintah pusat atau daerah. Jika menurut peraturan perundang–undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan (Henukh,*Et all*,2020).

Dengan demikian maka SAP adalah satu – satunya standar pelaksanaan akuntansi pemerintah oleh karena itu upaya pengharmonisan berbagai peraturan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, SAP mutlak dilakukan sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 tentang standart akuntansi pemerintah. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan adanya SAP ini diharapkan otonomi daerah mendapat perlindungan keamanan pada bidang keuangan melalui akuntabilitas.

Pertanggung jawaban keuangan berdasarkan standar rakyat pada setiap pemerintah daerah melalui DPRD makin mampu mengendalikan keuangan daerahnya, melalui transparansi informasi keuangan berbasis standar. Informasi sesuai SAP, pencatatan harus diidentifikasi sedemikian rupa sehingga diketahui informasi yang dihasilkan dari sistem yang berlaku, kemudian dilakukan penggolongan informasi yang dihasilkan (*mapping*) dengan pos-pos yang diatur oleh SAP. Dengan demikian dapat dihasilkan laporan keuangan sesuai SAP (Oktari,*Et all*,2016).

2.2.5 Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi (Tjiptono,2015) laporan keuangan adalah laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh suatu entitas pelaporan (Fajri, 2018).

Sedangkan Menurut (Rohman,2016), karakteristik laporan keuangan berkualitas merupakan laporan keuangan yang memiliki ciri memberikan informasi keuangan berguna bagi pemakai. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan harus memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Dan standar kualitas yang harus dipenuhi adalah:

- a. Dapat Dipahami
- b. Relevan
- c. Keandalan atau Reliabilitas
- d. Dapat dibandingkan

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang telah dicapai selama satu periode (satu tahun). Laporan keuanganlah yang akan menjadi data untuk para penggunanya untuk mejadi bahan dalam proses pengambilan keputusan, pertanggung jawaban serta gambaran penunjuk kesuksesan dalam suatu pemerintah daerah untuk mencapai tujuan (Ariska,*Et all*,2019).

Laporan keuangan sering dilakukan percobaan oleh Lembaga pemerintah akuntan, perusahaan dan sebagainya yang bertujuan untuk memastikan keakuratannya serta untuk tujuan pajak, pembiayaan atau investasi. Informasi keuangan yang disajikan dengan cara yang terstruktur dan dalam bentuk yang mudah dipahami. Analisis keuangan 24 mempercayakan data untuk menganalisis kinerja, dan membuat prediksi tentang arah masa depan harga saham perusahaan. Salah satu sumber yang penting dari kata keuangan yang dapat diandalkan dan diaudit adalah laporan tahunan yang berisi laporan keuangan perusahaan atau instansi (Darmawan,2020).

Laporan keuangan (*financial statement*) adalah laporan yang menggambarkan keadaan tentang asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan biaya biaya yang terjadi dalam suatu organisasi. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepenting, baik internal maupun eksternal (Sinaga,2016).

Menurut peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan karakteristik laporan keuangan adalah ukuran – ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Syarat yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu harus relevan, karena laporan keuangan yang relevan apabila informasi yang ada didalamnya

dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu.

Jenis – jenis laporan keuangan sendiri ada 5 sesuai dengan pembuatan laporan keuangan mengikuti pedoman yang ada dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (Trianto,2018):

1. Laporan laba rugi
2. Neraca
3. Perubahan Modal
4. Arus kas
5. Laporan catatan atas laporan keuangan (CaLK)

Sedangkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan ukuran orang yang menilai atau merinci dari suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan transaksi ekonomi yang menyatakan aktivitas yang berhubungan dengan uang dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintahan daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan (Erlina,2015:25)

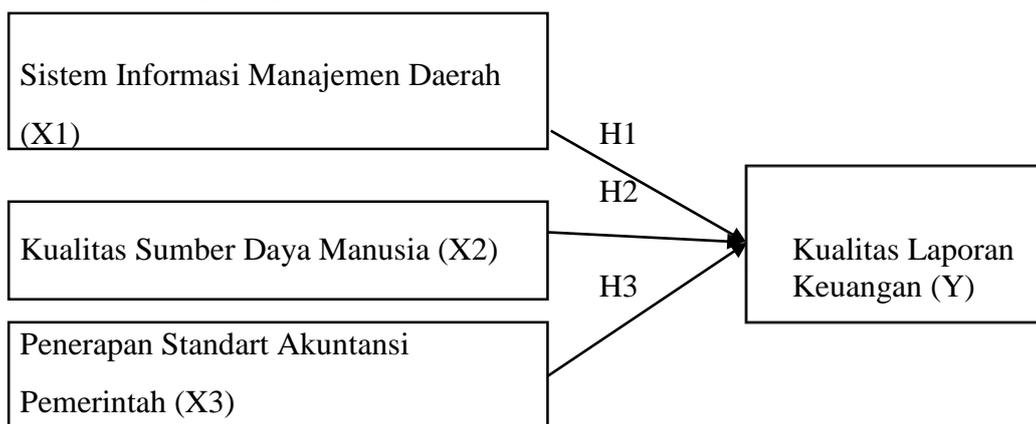
Hal senada dipaparkan oleh Baldric (2015:12) pengertian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.

Sementara menurut Yusuf (2013:1) mengemukakan bahwa: Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada stakeholder yang di dalamnya mencakup berbagai macam pekerjaan yang membutuhkan keuangan, termasuk komponen aset yang tercermin dalam neraca atau laporan posisi keuangan daerah, dimana setiap tahun dibuatkan laporanya setelah pelaksanaan anggaran.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka sebagai dasar untuk memuaskan hipotesis, berikut disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam penelitian pada gambar 2.1



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Pengaruh Antar Variabel

1. Pengaruh Variabel Sistem Informasi Manajemen Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA) merupakan aplikasi atau software yang diperuntukkan bagi pemerintahan, yang mampu memberi kemudahan untuk meningkatkan kinerja dan informasi secara cepat mengenai fungsi penganggaran, fungsi penatausahaan keuangan daerah, hingga fungsi akuntansi dan pelaporan. Suatu keharusan bagi pemerintah daerah untuk menjadikan pedoman dalam mengimplementasikan aplikasi SIMDA untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). SIMDA secara umum digunakan di lingkungan satuan kerja perangkat daerah (Khoirunisa, 2016).

Penelitian Sebelumnya yang dilakukan oleh (Cici Ariska *Et all* 2019), mengatakan bahwa secara persial sistem informasi manajemen memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Oktavia dan Rahayu 2019) menyimpulkan bahwa sistem informasi manajemen memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dimana jika tingkat simda semakin tinggi maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin baik. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penggunaan dan pengimplementasian SIMDA maka semakin bagus kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

2. Pengaruh Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut (Sukmanigrum, *Et, all*, 2012). Suatu sistem sebaik apapun akan sia-sia begitu saja apabila tidak ditunjang oleh kualitas SDM yang memadai khususnya kualitas pribadi SDM yang terdiri dari pendidikan, pengalaman, dan pelatihan (Indriasih, 2014).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Astawa putra *Et all*, 2017), mengatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan karena jika kualitas sdm yang ada berkualitas maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga semakin bagus.

3. Pengaruh Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dalam PP No. 24 Tahun 2005 Pasal 1 (4) Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Penyusunan SAP sendiri disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang dinyatakan dalam bentuk

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut PSAP.

SAP berlaku untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. SAP pada tingkat Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Sedangkan ditingkat daerah SAP diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota, dengan mengacu pada peraturan daerah (Perda) tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ikyarti dan Aprilia,2017), mengatakan bahwa penerapan SAP berpengaruh positif signifikan terhadap laporan keuangan karena apabila informasi yang dimiliki sap dan disertai praktek yang baik maka akan menghasilkan laporan keuangan yang baik.

2.5 Hipotesis

Terdapat beberapa hipotesis yang diajukan dipenelitian ini, antara lain :

H₁: Sistem Informasi Manajemen Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

H₂: Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

H₃: Standart Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

